IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI SIGLI KABUPATEN PIDIE

Ricky Muliawan Hansyar ¹, Halimah ²

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Jabal Ghafur, Sigli
Ilmu Administrasi Negara, Universitas Jabal Ghafur, Kota Sigli
e-mail: rickymuliawanhansyar@gmail.com , Halimah@unigha.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the waste management program policy at the Pidie Regency Environment Service has not been carried out optimally, because there is still a lot of garbage piled up in Sigli. Temporary waste collection points provided by the government are not commensurate with the volume of waste available. The focus of this research is the implementation of waste management program policies based on the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure at the Pidie District Environmental Service and obstacles in implementing waste management program policies at the Pidie District Environmental Service. The approach used in this research is a qualitative research approach. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. Meanwhile, the data analysis technique uses an interactive analysis model. The result of the study shows that waste management is still carried out using conventional systems, namely collection, removal and disposal even though there is Law No. 18 of 2008, Government Regulation No. 81 of 2012 and also Pidie Regency Qanun No. 6 of 2012 concerning waste management.

Keywords : Implementation, Policy, Program, Management, Waste

ABSTRAK

Implementasi kebijakan program pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie belum terlaksana dengan optimal, karena masih banyak terlihat sampah yang menumpuk di Sigli. Titik pengumpulan sampah sementara yang disediakan pemerintah tidak sebanding dengan volume sampah yang tersedia. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan program pengelolaan sampah berdasarkan variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie dan hambatan dalam implementasi kebijakan program pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara itu teknik analisis data menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih dilakukan dengan sistem konvensional yaitu pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan juga Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Program, Pengelolaan, Sampah

Pendahuluan

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah dalam Pasal 28 Ayat 1, yang berbunyi masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang

diselenggarakan Pemerintah dan atau pemerintah daerah.” itu artinya bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan demi terwujudnya lingkungan yang baik sehat, bersih dan rapi. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selain itu juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan kepada masyarakat dan instansi pemerintah atau swasta agar mengimplementasikan dalam setiap kegiatan di lapangan. Hal ini berarti bahwa setiap anggota elemen masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama terhadap Pengelolaan Sampah dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tersebut juga berlaku bagi segenap masyarakat Sigli, Kabupaten Pidie.

Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie sebesar 435.492 jiwa dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Sigli dengan jumlah penduduk sebesar 22,311 jiwa yang mana memiliki kontribusi terhadap penambahan jumlah sampah di Sigli. Ketidakikutan masyarakat dalam memelihara lingkungannya akan mengakibatkan lingkungan itu menjadi kurang bersih dan kurang sehat. Demikian juga masyarakat Sigli yang ada di lingkungannya akan mengakibatkan lingkungan perkotaan menjadi yang kotor. Selain itu partisipasi masyarakat luas sangat di perlukan dalam menjaga pelestarian lingkungan, karena hal ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Proses pembangunan di Sigli Sebagai Ibu Kota Kabupaten Pidie semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi perkembangan waktu.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu masalah yang timbul adalah masalah sampah yang mengakibatkan terjadinya penambahan volume sampah sehingga

berdampak negatif yaitu sampah mengakibatkan lingkungan menjadi kurang bersih dan kurang sehat, sampah jenis tertentu dapat menimbulkan sumber penyakit yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, sampah menurunkan nilai estetika suatu wilayah apabila penanganan sampah yang buruk dan sampah juga bisa menyebabkan bau busuk dan polusi udara yang menyengat serta sampah bisa menyebabkan musim hujan akan banjir dimana sampah dibuang sebarangan ke saluran air.

Berbagai upaya dilakukan untuk penanganan pengelolaan sampah namun upaya tersebut mengalami kendala salah satu yang menimbulkan masalah pengelolaan sampah adalah besar biaya untuk penanganan pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Biaya ini semakin lama semakin meningkat seiring bertambahnya penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan produksi sampah juga meningkat oleh karena itu ektifitas pengelolaan sampah juga harus ditingkatkan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Intinya kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir.

Saat ini volume sampah yang timbul di Sigli Kabupaten Pidie terus meningkat. Sampah-sampah tersebut berasal dari pasar, fasilitas umum dan pemukiman, maupun perkantoran, Jauhnya lokasi pembuangan akhir (TPA) dan keterbatasan sarana berupa bak penampungan sampah sementara menyebabkan penumpukan sampah serta masyarakat beranggapan bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah sehingga masyarakat tidak peduli tentang pengelolaan sampah yang baik, Sampah yang tidak dikelola dengan baik merupakan penyebab makin meningkatnya pencemaran air, tanah dan

udara serta meningkatkan potensi banjir di kabupaten Pidie. Permasalahan sampah perlu ditangani serius secara teknis, operasional dan manajemen yang tepat dan terpadu berdasarkan kondisi dan kebijakan daerah di Kabupaten Pidie. Selain itu pula kurangnya sumber daya manusia (SDM) yakni pasukan kuning dan sarana pengangkutan sampah yang ada dalam pelayanan pengangkutan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie. Dari 15 Gampong yang ada di Sigli Kabupaten Pidie yang terlayani oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengangkutan pelayanan persampahan hanya 11 Gampong saja, akan tetapi 4 Gampong belum terakses pelayanan pengangkutan persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sangat perlu dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahan di atas. Pemerintah Pidie (Instansi terkait) diharapkan mampu membawa masyarakat melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar dan mencari cara yang tepat untuk membatasi meningkatnya produksi sampah, khususnya sampah rumah tangga dan sampah berbahaya.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut Undang-Undang Sampah), untuk pertama kalinya terdapat landasan legal bagi pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur tentang kewajiban semua warga negara Indonesia untuk ikut dalam pengelolaan sampah dan kewajiban pengelola sampah.

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 merupakan salah satu payung hukum yang kuat dalam pengelolaan sampah. Implementasi Undang-Undang tersebut membutuhkan komitmen yang kuat juga dukungan dari seluruh stakeholder di Kabupaten Pidie. Tetapi sampai sekarang hasilnya masih belum memuaskan. Lebih jauh dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten atau Kota

dalam pengelolaan sampah. Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, maka dikeluarkanlah PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah tersebut berfungsi untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk dampak negatif yang diakibatkan kelalaian dalam pengelolaan sampah.

Secara teknis, instansi yang bertanggung jawab mengimplementasi kebijakan tentang Pengelolaan Sampah tersebut di Kabupaten Pidie adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie perlu melakukan langkah untuk memecahkan permasalahan kebijakan mengenai sampah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie. Hal ini diperlukan agar pengelolaan sampah menjadi lebih baik dan terarah sehingga tidak terjebak dalam polemik yang dapat mengancam penurunan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tingkat pengelolaan sampah di daerah Sigli Kabupaten Sigli dapat dinilai dari meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setempat berupa sampah rumah tangga, sampah pabrik dan sampah rumah sakit, Hal ini tercermin dari adanya peningkatan volume sampah dari tahun 2017 sampai tahun 2021 yang terlihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah Sampah Per Hari di Sigli Kab. Pidie

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Volume Sampah Per Hari (m ³)	120,5	135	148,5	209	224

Sumber Pidie dalam angka, 2021

Sebagaimana tahun 2017 rata-rata produksi sampah sekitar 130,5 m³/hari. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu sampai tahun 2021, jumlah produksi sampah meningkat menjadi 234 m³/hari yang pertambahan 103,5 m³/hari, sehingga rata-rata pertahun bertambah 20,7 m³/hari (Pidie dalam angka, 2021) sampah-sampah tersebut terdiri dari sampah organik dan anorganik. Kondisi ini tidak sebanding dengan ketersediaan tempat pembuangan akhir (TPA), sumber daya yang menangani kebersihan, terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah serta konsep pengelolaan sampah yang masih konvensional hingga masalah sosial yang ditimbulkan oleh sampah.

Metode

Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Di samping itu, pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan program pengelolaan sampah di Sigli Kabupaten Pidie. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sigli Kabupaten Pidie. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan potensi timbunan sampah yang dihasilkan di Sigli cenderung lebih besar dari pada kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Pidie serta penanganan pengelolaan sampah yang masih berpusat di daerah Sigli itu sendiri.

Hasil dan Pembahasan

Dalam melaksanakan Implementasi kebijakan memiliki kriteria yang berbeda menurut teori George Edward III diantaranya ialah komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi, Dinas Lingkungan Hidup kepada unsur-unsur terkait (stakeholder) belum optimal sehingga perlu diintensifkan. Secara khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie perlu memberikan edukasi kepada Masyarakat Sigli sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti penting pengelolaan sampah, seperti sosialisasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie kepada Masyarakat Sigli, dan penyuluhan/pelatihan tentang tata cara pengelolaan sampah rumah tangga kepada warga masyarakat Sigli.

Sumberdaya

Sumberdaya (SDM, non SDM, pembiayaan, Waktu) yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie saat ini masih belum memadai dari segi terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah, terbatasnya personil tenaga kebersihan dalam pengelolaan sampah, terbatasnya dana/anggaran untuk membiayai kegiatan proses pengelolaan sampah dan perlunya penambahan jumlah petugas sampah dan penambahan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) terutama di Sigliserta perlu pengadaan tong sampah organik dan anorganik.

Disposisi

Disposisi atau perilaku dari semua stakeholder dalam peran sertanya masing-masing untuk dapat melibatkan diri dalam program pengelolaan sampah di daerah Sigli sangat diharapkan serta, pemahaman masyarakat Sigli yang kurang memahami arti dari pentingnya pengelolaan sampah, Masyarakat Sigli masih menganggap pengelolaan sampah hanya merupakan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup serta kurangnya dukungan Masyarakat Sigli disebabkan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Di lain pihak, insentif/gaji yang

diberikan kepada para petugas lapangan belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup bulanan. Kondisi tersebut mengakibatkan sikap para petugas lapangan dalam melaksanakan tugas menjadi bervariasi. Ada petugas yang rajin, yang ada kurang rajin. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie perlu mengikuti sertakan petugas kebersihan untuk mengikuti pelatihan tentang pengelolaan sampah

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie masih perlu adanya pembenahan, terutama dalam aspek Standard Operating Procedures (SOP), sebagai pedoman bagi setiap implementor untuk melaksanakan tugas. Untuk mengatasi problem atau masalah yang ada pada sistem pengelolaan sampah di Sigli Kabupaten Pidie, maka upaya-upaya yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie yaitu : penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai, perekrutan tenaga kontrak untuk personil tenaga kebersihan, Segera Menyusun SOP (Standart Operasional Prosedur), pengalokasian dana/anggaran yang cukup untuk membiayai kegiatan proses pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie khususnya Sigli.

Simpulan dan Saran

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Sigli Kabupaten Pidie secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Sigli Kabupaten Pidie belum maksimal apabila dilihat pada UU RI No. 18 Tahun 2008, PP RI No. 81 Tahun 2012 dan Qanun Kabupaten Pidie No 6 tahun 2012 dari hasil penelitian pelaksanaan pengelolaan sampah di Sigli Kabupaten Pidie yang terjadi selama ini jika dihubungkan dengan variabel-variabel implementasi kebijakan dari George C. Edward III, masih perlu adanya pembenahan dari keempat variabel Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah tersebut yaitu pada variabel komunikasi,

sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada dinas lingkungan hidup Kabupaten Pidie sehingga hambatan dan kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Sigli Kabupaten Pidie dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kurangnya dukungan masyarakat Sigli disebabkan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Di lain pihak, insentif/gaji yang diberikan kepada para petugas lapangan belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup bulanan. Kondisi tersebut mengakibatkan sikap para petugas lapangan dalam melaksanakan tugas menjadi bervariasi. Ada petugas yang rajin, yang ada kurang rajin. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie perlu mengikuti sertakan petugas kebersihan untuk mengikuti pelatihan tentang pengelolaan sampah

Untuk mengatasi problem atau masalah yang ada pada sistem pengelolaan sampah di Sigli Kabupaten Pidie, maka upaya-upaya yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie yaitu: penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai, perekrutan tenaga kontrak untuk personil tenaga kebersihan, Segera Menyusun SOP (Standard Operasional Prosedur), pengalokasian dana/anggaran yang cukup untuk membiayai kegiatan proses pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie khususnya di daerah Sigli.

Daftar Pustaka

- Arya, Wardhana W. 2004. Dampak Pencemaran Lingkungan. Cetakan Keempat Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Bungin, B.M. 2010. Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Kencana.
- Hisyam, Zaini. 2008. Teknik-Teknik Evaluasi. Jakarta: PT. Indeks

Iskandar. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada Press.

Lexi J. Moleong. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosdakarya

Mankunegara. 2005. Konsep Evaluasi. Bandung: PT. Refika Aditama

Mukono. 2006. Konsep Dasar Kesehatan Lingkungan. Surabaya: Airlangga University Press.

Nugroho, Rian D. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Media Kompetindo.

Notoadmojo, Soekidjo. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Subarsono,AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik: konsep, teori dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudijono, Anas. 2005. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Toha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana.

Zulfikar, Z. (2021, January). STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. In Prosiding Seminar Nasional Universitas Jabal Ghafur (Vol. 1, No. 1, pp. 433-439).

Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tentang Pengelolaan Sampah.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.